

Konstruksi Media Online Detik.com dan Kompas.com terhadap Vanuatu (Analisis *Framing* Pemberitaan Vanuatu Pasca Pengangkatan Isu Pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75)

Fikri Ali Kurnia¹, Shulfi Ana Helmi², Sunnah Dwi Rochmana³

*Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Jawa Timur,
Surabaya, Jawa Timur ^{1), 2), 3)}*

fikia12.fa@gmail.com¹, shulfiana021@gmail.com², sunnahdwirochmana@gmail.com³

ABSTRACT

Vanuatu is one of the Pacific Island countries that consistently raises the issue of alleged human rights violations in Papua at every opportunity at the UN session. On September 27, 2020, Vanuatu, represented by the Prime Minister of the Republic of Vanuatu, Bob Loughman, returned to address the issue related to human rights violations of the Papuan at the 75th UN session. Vanuatu's statement and its reply from the Indonesian diplomat, Sylvany Austin Pasaribu, at the 75th UN session became the spotlight of various media. Detik.com and Kompas.com as online media pioneers and one of the most frequently accessed news sites, were also reported that occurrence. This research aims to find out the differences between those media on packaging its report of Vanuatu after the issue of Papuan human rights violations was raised at the 75th UN General Assembly. The news period under research is from 27 September to 2 October 2020. This research uses qualitative research method with the Zhongdang Pan and Gerald M Kosicki framing analysis model. In this research, Detik.com was more likely to corner Vanuatu. This matter can be seen in terms of quantity and packaging of news. Meanwhile, Kompas.com, didn't put Vanuatu in an advantageous position, but was trying to show balance in its report.

Keywords: *Framing, Online Media, Vanuatu, UN Session*

ABSTRAK

Vanuatu merupakan salah satu negara Kepulauan Pasifik yang secara konsisten menyampaikan isu dugaan pelanggaran HAM Papua dalam setiap kesempatannya di Sidang Umum PBB. Pada 27 September 2020, Vanuatu yang diwakili oleh Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman, kembali menyinggung isu kasus pelanggaran HAM masyarakat Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75. Pernyataan Vanuatu dan jawaban dari Diplomat Indonesia, Sylvany Austin Pasaribu dalam sidang PBB ke-75 tersebut menjadi sorotan berbagai media. Salah satu media yang turut memberitakan yaitu Detik.com dan Kompas.com sebagai pionir media *online* dan salah satu situs berita yang paling sering diakses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedua media *online* tersebut mengemas pemberitaannya terhadap Vanuatu pasca disinggungnya isu pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75. Periode berita yang diteliti yakni sejak tanggal 27 September hingga 2 Oktober 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicky. Dalam penelitian ini, Detik.com lebih cenderung menyudutkan Vanuatu. Hal ini dapat dilihat dari segi kuantitas maupun pengemasan berita. Sedangkan Kompas.com meskipun tidak

menempatkan Vanuatu dalam posisi yang menguntungkan, namun berusaha menunjukkan keberimbangan dalam pemberitaan.

Kata kunci: Framing, Media Online, Vanuatu, Sidang Umum PBB

PENDAHULUAN

Media-media baru akan selalu hadir seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Melihat pada sejarah perkembangan media, mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg melahirkan praktik jurnalisme media cetak, kemunculan radio melahirkan jurnalisme radio dan kehadiran televisi pada pertengahan abad 20 melahirkan praktik jurnalisme *broadcasting* (Margianto & Syaefullah, 2014). Saat ini kemunculan internet juga memicu era baru dalam perkembangan media. Muncul sebuah istilah *new media* untuk membedakan karakteristik dari segi interaksionalitas oleh media itu sendiri. Interaksionalitas disini yakni interaksi antara media dengan khalayaknya yang dapat dilakukan secara *real-time*. Satu hal yang sebelumnya mustahil dilakukan oleh media konvensional, kini dapat tercapai akibat adanya internet.

Internet, khususnya setelah era Web 2.0 yang membuat konten-konten di internet terpusat pada pengguna internet itu sendiri, mengakibatkan arus informasi bertukar secara cepat. Kecepatan arus informasi inilah yang nantinya menjadi keunggulan dari media yang berbasis *online* (Stephen W. Littlejohn, 2009). Mondry mengatakan bahwa media *online* merupakan media yang menggunakan internet, berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi secara private maupun secara publik. Dalam buku *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, Media *online* diartikan sebagai media massa yang tersaji secara *online* di situs web. Media *online* dapat disebut juga sebagai *cybermedia*, internet media dan *new media*.

Adanya *new media*, dunia berita dan pemberitaan mengalami konvergensi media dan terjadi pertukaran penyebaran berita tanpa mengenal batas waktu dan ruang. Hal tersebut memberikan dampak kemudahan dalam mengakses ke berbagai situs yang tersedia. Selain itu, media *online* makin dipilih dan digemari oleh kalangan jurnalistik dan masyarakat, karena tidak hanya dapat mencari dan memperoleh informasi, tetapi juga dapat melakukan korespondensi atau komunikasi tertulis dengan narasumber (Romli, 2012).

Melihat potensi tersebut, perusahaan media cetak Republika untuk pertama kalinya di Indonesia juga menyajikan berita-beritanya secara *online* melalui situs www.republika.co.id. Disusul oleh perusahaan cetak lain yang turut memindahkan berita dari media cetak ke media *online*, Detik.com menjadi pelopor awal media yang sepenuhnya berbasis di *online*.

Digagas oleh empat sekawan yaitu Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman dan Didi Nugrahadi pada 9 Juli 1998, Detik.com mengenalkan langgam berita baru yakni ringkas *to the point*. Tak jarang atas nama kecepatan, berita detik.com tidak selalu lengkap dengan unsur 5W + 1H layaknya pakem baku jurnalistik (Margianto & Syaefullah, 2014). Berbeda dengan Detik.com yang kini sudah diakuisisi CT Corp milik Chairul Tanjung pada tanggal 3 Agustus 2011, Kompas.com melalui situs resminya menegaskan bahwa media onlinenya tetap berpegang teguh pada pepatah jurnalistik lama "*Get it first, but first get it right*".

Kompas.com sendiri merupakan salah satu pionir media *online* di Indonesia yang pertama kali hadir pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online. Awalnya hanya menyajikan berita replika dari harian Kompas, Kompas Online mulai menyajikan perkembangan berita-berita terbaru sepanjang hari dan tidak terpaku dengan harian Kompas. Hingga akhirnya *me-rebranding* dirinya menjadi Kompas.com pada 29 Mei 2008 (dikutip dari inside.kompas.com).

Dengan adanya kemudahan dan kecepatan arus pengiriman informasi secara daring, sebuah berita tentu akan cepat diketahui dan tersebar di masyarakat. Hal ini yang membuat media *online* berlomba-lomba menjadi yang pertama untuk memberitakan agar situs merekalah yang pertama kali dikunjungi oleh khalayak. Tidak hanya soal kecepatan pemberian informasi, media juga memiliki peran dalam membentuk persepsi khalayaknya

melalui berita-berita yang dimuat. Berdasarkan teori Agenda Setting milik Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972), sebuah media menciptakan persepsi dan *public awareness* (kesadaran masyarakat) dengan menekankan isi beritanya kepada sebuah isu yang dianggap paling penting oleh media itu sendiri (Stephen W. Littlejohn, 2009).

Salah satu isu yang ramai diperbincangkan berbagai media, termasuk diantaranya media *online* Kompas.com dan Detik.com, yakni tentang Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman yang mengungkit perihal masalah pelanggaran HAM masyarakat Papua di Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 27 September 2020. Hal ini bukan pertama kalinya bagi Vanuatu, negara yang terletak diantara Kaledonia Baru dan Fiji di wilayah Pasifik Selatan, menyinggung Indonesia soal penanganan dan pelanggaran HAM yang ada di Papua. (Mukaromah, 2020)

Pada tahun 2016, Vanuatu bersama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Melalui kesempatan berpidato di Majelis PBB, mereka mendesak untuk dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut. Hal ini ditanggapi oleh Indonesia sebagai laporan bermotif politik dan mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. Selanjutnya di tahun 2017, 2018 dan 2019, Vanuatu terus membawakan isu yang sama dalam setiap kesempatannya di sidang PBB. Pada tahun 2019, Indonesia yang diwakili oleh Rayyanul Sangadji melalui hak jawabnya juga menanggapi secara tegas bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Vanuatu mengatakan hal tersebut untuk seakan-akan mendukung isu HAM, padahal sebenarnya negara itu mendukung agenda separatistis. Rayyanul bahkan menyebut langkah provokatif Vanuatu adalah *state-sponsored separatism* (Permana, 2020).

Di tahun 2020, Vanuatu kembali mengangkat isu yang sama dibawakan oleh Perdana Menteri-nya, Bob Loughman. Vanuatu merupakan negara dengan masyarakat yang berasal dari ras Melanesia. Atas dasar kesamaan ras inilah yang disinyalir melatarbelakangi Vanuatu beserta negara-negara kepulauan Pasifik lainnya untuk terus mengusik Indonesia terkait kedaulatan masyarakat Papua. Pada sidang PBB ke-75, pernyataan Bob Loughman mendapat tanggapan dari diplomat RI di PBB, Silwany Austin Pasaribu. Silwany kembali menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia sejak 1945. Hal ini juga sudah didukung oleh PBB dan komunitas global lainnya. Silwany juga turut menyindir Vanuatu karena terlalu mencampuri urusan negara lain dan tidak menjalankan apa yang sudah tercantum dalam Piagam PBB (Permana, detikNews, 2020).

Dalam buku yang berjudul "*The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of Knowledge*" (1996), Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, pertama kalinya memperkenalkan teori konstruksi sosial atau realitas. Media dalam pandangan konstruksionis merupakan agen konstruksi, Media mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan. Dari berbagai peristiwa yang terjadi, media menyusun realitas tersebut hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Berita yang disajikan adalah produk yang berasal dari fakta itu sendiri yang kemudian diolah dengan campur tangan interaksi wartawan. Jadi, berita bukanlah suatu peristiwa ataupun fakta dalam arti nyata (Berger & Luckman, 1991).

Setiap media mempunyai kepentingannya masing-masing, yang mana hal ini sangat memengaruhi bagaimana konstruksi berita yang akan disajikan. Konstruksi sosial mengacu pada proses dimana peristiwa, orang, nilai dan ide pertama kali didefinisikan atau ditafsirkan dengan cara tertentu dan diberi nilai serta prioritas, sebagian besar oleh media massa (McQuail, 2010).

Melalui analisis framing berita atau pembingkaiian berita, terdapat perbedaan cara menyampaikan sebuah berita oleh media. Selain itu, framing dapat memengaruhi pembaca dengan menawarkan kesan meyakinkan atas sebuah pemaknaan dan asumsi yang mendasar (McQuail, 2010). *Framing* dalam konteks pemberitaan sendiri menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki adalah sebuah strategi untuk membentuk dan memproses berita dimana perangkat kognisi yang digunakan dalam mengode informasi dan menafsirkan peristiwa, dihubungkan dengan rutinitas serta konvensi pembentukan berita (Eriyanto, 2012).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana Kompas.com dan Detik.com mengemas pemberitaannya terhadap Vanuatu setelah kasus pelanggaran HAM di

Papua diungkit oleh Vanuatu pada Sidang PBB ke-75. Di Indonesia, kedua media *online* tersebut bukan hanya pionir, namun juga merupakan situs berita yang paling banyak dikunjungi oleh khalayak umum. Menurut data dari Alexa pada 28 Oktober 2020, Kompas.com pada urutan ketiga dan Detik.com pada urutan keempat sebagai situs media *online* yang paling banyak dikunjungi.

Untuk itulah, peneliti mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembingkai berita yang dilakukan oleh Detik.com dan Kompas.com terhadap Vanuatu yang mengungkit kasus pelanggaran HAM di Papua pada Sidang PBB ke-75?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfokus pada interpretasi berdasarkan temuan data yang didapat (Neuman, 2014). Analisis *framing* adalah bagian dari pandangan konstruksionis yang berarti bahwa setiap berita yang sampai pada pembaca telah dikonstruksikan oleh media massa. Pan dan Kosicki juga mendefinisikan *framing* sebagai proses menciptakan sebuah pesan menjadi lebih menonjol dan menempatkan informasi yang lebih sehingga pembaca tertuju pada pesan yang telah disajikan (Eriyanto, 2012).

Analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menjelaskan terdapat empat stuktur bingkai yang digunakan media yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Pertama, sintaksis berkaitan dengan penyusunan peristiwa dalam susunan umum berita. Kedua, skrip berhubungan dengan cara wartawan mengkisahkan dan menampilkan fakta dalam sebuah berita. Ketiga, tematik berkaitan dengan pandangan yang diungkapkan wartawan sehingga membentuk teks keseluruhan. Keempat, retorik berkaitan dengan pilihan kata, gambar, grafik, dan idiom yang memiliki arti tertentu dan wartawan memberi penekanan dalam berita.

Tabel 1. Skema analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Eriyanto, 2012)

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang diamati
Sintaksis (Cara wartawan menyusun berita)	Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup
Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)	Kelengkapan berita	5W+1H
Tematik (Cara wartawan menulis fakta)	Detail, Kohrensi, Bentuk kalimat dan Kata ganti	Paragraph, preposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)	Leksikon, Grafis dan Metafora	Kata, idiom, gambar, foto dan grafik

Pemilihan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki karena metode ini dapat melihat bagaimana sebuah realitas diseleksi lalu dibingkai dalam pemberitaan dengan menggunakan empat stuktur yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Realitas yang akan digambarkan pada penelitian ini ialah bagaimana media *online* Detik.com dan Kompas.com dalam melakukan pembingkai berita mengenai Vanuatu pasca pengangkatan isu pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75. Subjek dalam penelitian ini adalah media *online* Detik.com dan Kompas.com. Sedangkan objeknya adalah artikel-artikel berita pada periode tanggal 27 September 2020 hingga 2 Oktober 2020 yang memberitakan tentang Vanuatu dalam kaitannya dengan isu pelanggaran HAM Papua yang disinggung di Sidang Umum PBB ke-75.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah Vanuatu membawa isu pelanggaran HAM Papua di Sidang Umum PBB ke-75 pada 27 September 2020 waktu setempat, berbagai media ramai membahas hal tersebut, tidak terkecuali media *online* Detik.com dan Kompas.com. Peneliti mengidentifikasi berita-berita terkait Vanuatu pada kedua media *online* tersebut. Terhitung sejak 27 September hingga 2 Oktober 2020 setidaknya ada 11 artikel berita yang dimuat oleh Detik.com dan 11 artikel berita yang dimuat oleh Kompas.com. Dalam penelitian ini kemudian berita dikategorisasikan kedalam dua *frame*. Yaitu *frame favorable* dan *unfavorable*. *Frame favorable* adalah model pemberitaan yang cenderung mendukung atau menguntungkan bagi pihak tertentu. Sedangkan *frame unfavorable* adalah model pemberitaan yang cenderung merugikan atau mendiskreditkan pihak-pihak tertentu (Eriyanto, 2012). Dalam penelitian ini, pihak yang dimaksud adalah pemerintah Vanuatu dan pemerintah Indonesia. Distribusi *frame* pemberitaan untuk masing-masing pihak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Frame pemberitaan berdasarkan kepentingan pemerintah Vanuatu

<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>
Vanuatu menilai komentar rasis di medsos terkesan terkoordinasi	Vanuatu mensponsori sparatisme
	Vanuatu tidak memahami prinsip fundamental piagam PBB
	Vanuatu masih belum menandatangani konvensi internasional penghapusan diskriminasi rasial
	Vanuatu bukan perwakilan Papua
	Vanuatu pernah memasukkan Benny (pimpinan gerakan pembebasan Papua Barat) dalam KTHAM PBB
	Vanuatu dianggap tidak memahami norma dan hukum internasional
	Jejak hitam bank asal Vanuatu di Indonesia
	Fakta perekonomian Vanuatu

Tabel 3. Frame pemberitaan berdasarkan kepentingan pemerintah Indonesia

<i>Favorable</i>	<i>Unfavorable</i>
Aziz (Wakil DPR) yang menyatakan dukungan pada pemerintah dalam menjaga kehormatan negara	Amnesty Internasional menyangkan respon Indonesia atas tuduhan Vanuatu
Menlu Indonesia telah mengundang dewan HAM PBB	Kontas menilai Indonesia seakan tak mengerti diplomasi
Pembelaan perwakilan Indonesia terhadap dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam sidang PBB sejak 2016-2020	
Sejak reformasi HAM telah jadi prioritas, KOMNAS HAM telah dibentuk berdasarkan UU	
TNI dan POLRI lindungi rakyat Papua dari kelompok kriminal bersenjata	

Komposisi *frame*, sebagaimana yang tercantum pada tabel diatas menunjukkan adanya ketimpangan pemberitaan. Dapat dilihat bahwa pemberitaan terhadap Vanuatu lebih banyak ditempatkan pada *frame unfavorable* dan Indonesia lebih banyak mendapat sorotan dengan *frame favorable*. Selengkapny komposisi frame berita Detik.com dan Kompas.com dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Frekuensi frame pemberitaan

Frame Berita	Detik.com		Kompas.com	
	Vanuatu	Indonesia	Vanuatu	Indonesia
Favorable	1	3	1	4
Unfavorable	7	-	4	2
Jumlah	8	3	5	6

Masing-masing media baik Detik.com maupun Kompas.com melakukan pembingkaihan yang berbeda terhadap kasus ini. Model analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis *framing* dari Zhongdong Pan dan Gerald M. Kosicky. Model analisis *framing* ini mengelompokkan berita dalam empat sub kategori yaitu sintaksis (bagaimana cara wartawan menyusun berita), skrip (bagaimana cara wartawan menyusun fakta), tematik (bagaimana cara wartawan menuliskan fakta), dan retorik (bagaimana cara wartawan menekankan fakta) (Eriyanto, 2012).

Sintaksis

Unit-unit yang diamati dalam sintaksis yaitu *headline* atau judul, lead, latar informasi, kutipan, sumber pernyataan, dan penutup. Diantara unit-unit sintaksis tersebut, judul adalah unit yang memiliki sisi kemenonjolan tinggi dan mampu memberikan gambaran kecenderungan arah isi teks.

Mayoritas judul yang digunakan oleh kedua media cenderung menyudutkan dan menempatkan Vanuatu berada dipihak yang bersalah. Sebagai contoh, judul-judul dalam artikel berita milik Detik.com yaitu “Bukan Pertama Kali, Vanuatu Rutin Serang Indonesia soal Papua di PBB”, “Sidang Umum PBB, Indonesia Minta Vanuatu Tak Ikut Campur Soal Papua”, “Vanuatu Usik RI di Sidang PBB, DPR Minta Antarnegara Saling Menghormati”, “Ulah Vanuatu Lagi-Lagi Usik Indonesia Dibalas Jawaban Menohok”, “MPR Sebut Sikap Vanuatu di PBB Cederai Hubungan Diplomatik dengan RI”, “Mahfud Bangga dengan Silwany Pasaribu: Vanuatu Memang Mengada-ada”.

Dapat dilihat bahwa tiga judul berita terakhir yang dimuat oleh Detik.com seolah-olah sengaja untuk menunjukkan sarkasme kepada negara Vanuatu atau seolah ingin menunjukkan motif tindakan Vanuatu dalam Sidang PBB. Judul yang dimaksud yaitu “3 Fakta Ekonomi Vanuatu yang Usik RI di Sidang PBB”, “Jejak Hitam Bank Asal Vanuatu di Jakarta”, dan “Mengintip Ekonomi Vanuatu, Negara yang Serang RI soal Papua di PBB”.

Sementara itu, Kompas.com juga tidak jauh berbeda dengan Detik.com. Judul-judul artikel berita yang digunakan antara lain “Indonesia Dalam Sidang Umum PBB : Vanuatu Jangan Ikut Campur Urusan Papua”, “Diingatkan Jangan Ikut Campur, Sudah Beberapa Kali Vanuatu Singgung Isu Papua di Sidang PBB”, “Bantah Vanuatu, Kemenlu Sebut Sudah Undang Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua”, “PM Vanuatu Diminta Belajar Ilmu Hubungan Internasional”, “Indonesia ke Vanuatu : Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi !”, “Soal Tuduhan Pelanggaran HAM di Papua, Mahfud : Vanuatu Mengada-ada”. Berbeda dengan Detik.com yang keseluruhan judulnya cenderung mendiskreditkan Vanuatu, terdapat dua judul artikel berita dari Kompas.com yang kontra perihal respons Indonesia terhadap Vanuatu pada Sidang Umum PBB ke-75 lalu. Judul yang dimaksud yaitu “Amnesty Sayangkan Respons Indonesia ke Vanuatu soal Papua di Sidang PBB” dan “Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras : Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik”. Dengan dua judul ini, Kompas.com berusaha membuka sudut pandang baru dan tidak hanya terfokus pada Vanuatu yang dijadikan sebagai pihak yang bersalah.

Terkait dengan kutipan, Detik.com lebih banyak mengutip dari pernyataan Silwany Pasaribu, Diplomat perwakilan Indonesia dalam Sidang Umum PBB ke-75 dan juga beberapa kutipan lama dari Jusuf Kalla. Kutipan dari keduanya cenderung mengkritisi tindakan Vanuatu. Selain itu, terdapat satu kutipan dari Hasan Kleib, Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, tahun 2019. Kutipan tersebut berisi kecaman atas tindakan Vanuatu yang melakukan langkah manipulatif dengan menyusupkan Benny Wenda dalam Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (KTHAM PBB).

Kompas.com juga banyak menggunakan kutipan dari Silwany Pasaribu. Berbeda dengan Detik.com, Kompas.com juga menggunakan kutipan dari apa yang disampaikan Vanuatu terkait tuduhan pelanggaran HAM di Papua. Kutipan yang digunakan oleh Kompas.com yaitu kutipan dari Moana, Perdana Menteri Vanuatu pada Sidang Umum PBB tahun 2015 lalu. Dalam kutipan tersebut, Moana menyebutkan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di Papua Barat dan desakan agar pengawas HAM PBB, wartawan internasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli HAM untuk memperoleh akses ke Papua Barat. Ada pula kutipan dari Bob Loughman, Perdana Menteri Vanuatu yang meminta Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Kepulauan Pasifik terkait dugaan pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75. Juga kutipan dari Manasye

Sogavare, Perdana Menteri Solomon dalam Sidang Umum PBB tahun 2016 terkait pelanggaran HAM di Papua. Sementara Detik.com sama sekali tidak menggunakan kutipan dari pihak lain selain Indonesia.

Terkait dengan sumber pernyataan, kedua media ini memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih narasumber. Detik.com menggunakan sumber pernyataan dari Aziz Syamsudin, Wakil Ketua DPR yang menyatakan dukungannya dengan memberikan tanggapan bahwa pemerintah Indonesia harus berkomitmen menjaga kedaulatan negara. Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR yang menyatakan pandangan Vanuatu itu keliru dan dapat mencederai hubungan diplomatiknya dengan RI. Syarif juga menyatakan bahwa TNI dan POLRI akan senantiasa melindungi warga Papua dari kelompok kriminal bersenjata. Mahfud MD, Menko Polhukam, yang menyatakan jika ada pelanggaran HAM di Papua, tentu pemerintah akan menyelidikinya karena HAM telah menjadi prioritas sejak adanya reformasi.

Sementara sumber pernyataan yang digunakan oleh Kompas.com yaitu berasal dari Kemenlu yang menyatakan telah mengundang dewan HAM PBB. Amnesty, yang menyalahkan respons Indonesia, karena harusnya Indonesia bisa meresponnya dengan cara yang lebih elegan. Kontras, yang menilai Indonesia seakan tak mengerti diplomasi. Sekalipun di Kompas.com juga ada sumber informasi dari Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsudin, Mahfud DM dan Menko Polhukam, namun ketiga sumber informasi yang telah disebutkan diatas dapat memberikan sudut pandang baru dalam kasus ini.

Sekalipun bersifat melengkapi, sumber berita berperan penting dalam menciptakan berita yang objektif. Pentingnya seorang narasumber terkait dengan upaya untuk menjaga keseimbangan pemberitaan yang *cover both side* dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan masalah pemberitaan. Kompas.com mencoba menunjukkan keberimbangan, hal sebaliknya yang justru dilakukan oleh Detik.com yang hanya terfokus pada pemerintah Indonesia saja.

Skrip

Elemen kedua yang diamati yaitu skrip. Pengamatan terhadap skrip dilihat dari bagaimana wartawan mengisahkan fakta melalui kelengkapan 5W+1H. Detik.com sudah memenuhi unsur 5W+1H dalam setiap artikel beritanya. Namun Detik.com lebih menekankan pada unsur *what* dan *how* yang menjelaskan tentang bantahan Indonesia soal tuduhan dugaan pelanggaran HAM di Papua oleh Vanuatu. Salah satu penonjolan unsur *what* dan *how* terdapat pada kutipan berita berikut :

"Seperti diketahui, Vanuatu lagi-lagi mengusik Indonesia dengan mengungkit isu pelanggaran HAM di Papua. Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua itu dalam Sidang Majelis Umum PBB," penonjolan unsur *what* Detik.com.

"Mulanya Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua itu dalam Sidang Majelis Umum PBB. Indonesia kemudian memakai hak jawabnya untuk membantah Vanuatu," penonjolan unsur *who* Detik.com.

Artikel-artikel berita Kompas.com telah memenuhi kelengkapan unsur 5W+1H. Sama halnya dengan Detik.com, Kompas.com juga lebih menonjolkan unsur *what* dan *how*. Hal yang membedakan dari kedua media ini yaitu terdapat dalam unsur *who*. Detik.com terfokus pada siapa yang cenderung mendukung dan memuji tindakan yang telah dilakukan diplomat RI pada Sidang Umum PBB, sedangkan Kompas.com menghadirkan unsur *who* dari pihak yang tidak begitu menyetujui tindakan atau respons yang diberikan perwakilan Indonesia pada sidang PBB. Sehingga unsur *how* yang ditonjolkan dalam Kompas.com tidak hanya terfokus pada bagaimana bantahan Indonesia terhadap tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang dilontarkan oleh Vanuatu, tetapi juga bagaimana harusnya Indonesia bersikap menghadapi tuduhan tersebut, seperti dalam kutipan berita berikut:

"Indonesia seharusnya menjawab tuduhan tersebut dengan cara yang lebih elegan, misalnya, dengan cara yang memperlihatkan komitmen Indonesia dalam penegakkan hukum dan HAM," penonjolan unsur *how* Kompas.com

Sedangkan unsur *why* terkait dengan mengapa negara Vanuatu melontarkan tuduhan tersebut tidak dibahas oleh kedua media ini, baik Detik.com maupun Kompas.com.

Tematik

Aspek selanjutnya yang diamati yaitu tematik, yakni bagaimana wartawan menuliskan fakta. Unsur yang dianalisis dalam aspek tematik yaitu dengan mengamati detail, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat, maupun kata ganti. Pemberitaan Detik.com lebih fokus pada negara Vanuatu yang kembali mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua. Hal ini dapat dilihat dari proporsi kalimat terbanyak yang digunakan Detik.com, yaitu mengungkit tentang Vanuatu yang menyoalkan isu pelanggaran HAM di Papua. Dari 11 berita, setidaknya ada 8 berita yang memuat kalimat “Vanuatu lagi-lagi mengusik Indonesia dengan mengungkit isu pelanggaran HAM di Papua...”. Penyusunan masing-masing berita kemudian dikohersikan secara berbeda dalam penyusunan detail-detail pemberitaan baik itu narasumber maupun sumber kutipan. Namun semua berita yang dimuat oleh Detik.com mengarah pada satu ide yang sama yaitu Vanuatu yang kembali mengungkit isu pelanggaran HAM Papua.

Sementara itu, Kompas.com lebih banyak menunjukkan detail-detail secara lebih runtut dan menyeluruh. Muatan berita berisi kutipan pernyataan dari Vanuatu maupun negara lain yang juga pernah mengangkat isu Papua dalam berbagai forum internasional, pernyataan dari Kemenlu yang membantah tuduhan Vanuatu tentang kunjungan Dewan HAM PBB, sanggahan maupun kritik balik dari diplomat Indonesia kepada Vanuatu, maupun lembaga-lembaga terkait seperti KontraS dan Amnesty yang turut mengomentari respons Indonesia.

Retoris

Aspek terakhir yang dianalisis yaitu retorik. Aspek ini untuk mengetahui bagaimana cara wartawan menekankan fakta. Unsur-unsur yang dianalisis meliputi penggunaan leksikon, grafis, *metaphor* atau gaya bahasa, dan pengandaian. Untuk memperpejas perbedaan gaya bahasa dari kedua media ini dilakukan komparasi dari dua berita yang bermuatan sama. Kompas.com cenderung menggunakan gaya bahasa yang lebih halus dan bermain aman. Sedangkan Detik.com cenderung menggunakan bahasa yang lebih frontal dan terkesan provokatif, sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan berikut:

*“Republik Vanuatu yang lagi-lagi mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB menjadi sorotan wakil rakyat di Senayan. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin **meminta** Vanuatu menghormati kedaulatan RI,”* (Detik.com, 28 September 2020).

*“Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai, pernyataan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman yang menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua **terkesan** tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia,”* (Kompas.com, 28 September 2020).

Detik.com secara gamblang menggunakan kata ‘meminta’ yang terkesan lebih frontal. Jika dibuat perbandingan, pemilihan penggunaan kata ‘terkesan’ yang digunakan oleh Kompas.com membuatnya terlihat lebih berhati-hati dalam penyampaian berita. Selain itu Detik.com juga cenderung menggunakan kata yang memberikan kesan negatif pada Vanuatu seperti ‘mengusik’ dan ‘serangan’. Berbeda dengan Detik.com, Kompas.com meletakkan kata-kata yang sensitif dalam kutipan langsung si narasumber.

“Vanuatu lagi-lagi mengusik Indonesia dengan mengungkit isu pelanggaran HAM di Papua,” (Detik.com, 28 September 2020).

“Vanuatu kembali mengusik Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB. Negara kepulauan itu kembali mengungkit masalah Papua untuk menyerang Indonesia. Serangan ini merupakan ke sekian kalinya yang dilakukan Vanuatu,” (Detik.com, 2 Oktober 2020).

“Fakta itu, menurut Azis, perlu dihormati Vanuatu maupun kelompok lain yang terus berupaya memprovokasi keutuhan NKRI “Mungkin PM Vanuatu perlu belajar ilmu hubungan internasional sehingga memahami norma dan hukum secara benar,” ucapnya,” (Kompas.com, 28 September 2020).

Sementara dalam penggunaan grafis, kedua media ini sama-sama menggunakan tampilan foto berdasarkan siapa yang menjadi subjek utama dalam berita yang diangkatnya.

SIMPULAN

Dari analisis *framing* media *online* Detik.com dan Kompas.com dalam pemberitaannya mengenai Vanuatu tentang pengangkatan isu pelanggaran HAM Papua dalam sidang PBB ke-75 pada periode pemberitaan 27 September 2020 hingga 2 Oktober 2020, dapat disimpulkan bahwa kedua media ini memiliki sudut pandang pemberitaan yang berbeda, yaitu:

1. Melalui berita-berita yang disampaikan, Detik.com cenderung menyudutkan Vanuatu. Dapat dilihat dari segi kuantitas maupun pengemasan berita. Dari 11 artikel berita yang dimuat, 7 diantaranya adalah artikel yang cenderung mendiskreditkan negara Vanuatu. Baik judul berita, kutipan yang dipakai, narasumber yang dipilih, fokus pemberitaan, maupun penggunaan leksikon, menempatkan negara Vanuatu pada posisi yang tidak begitu menguntungkan.
2. Sementara itu, Kompas.com meskipun tidak menempatkan Vanuatu pada posisi yang menguntungkan, ia berusaha menunjukkan keberimbangan dengan turut serta menyertakan kutipan dari Vanuatu, menggunakan narasumber yang menunjukkan sudut pandang baru tidak serta merta menyetujui sikap Indonesia, juga penggunaan gaya bahasa yang terkesan lebih berhati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Berger, P. L., & Luckman, T. (1991). *The Social Construction of Reality*. New York: Penguin Books.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS Group.
- Margianto, J. H., & Syaefullah, A. (2014). *Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika*. Jakarta: AJI Indonesia.
- McQuail, D. (2010). *Mass Communication Theory* (6th ed.). London: SAGE Publications.
- Mursito. (2012). *Realitas Media*. Solo: Perpustakaan UNS.
- Neuman, W. L. (2014). *Basics of Social Research : Qualitative & Quantitative Approaches*. Boston: Pearson.
- Romli, A. S. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendika.
- Stephen W. Littlejohn, K. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*. SAGE Publications.

Jurnal:

- Andriani, T., Hidayatullah, A., & Ishaka, M. (2018, Desember). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN TENTANG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PROVINSI NTB PERIODE 2018-2023 PADA MEDIA ONLINE BIMAKINI.COM DAN STABILITAS.COM EDISI 15 MEI-23 JUNI 2018. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 38-55.
- Emeraldien, F. Z., Purnomo, A., & Handoko, N. W. (2019). Analisis Framing terhadap Pemberitaan Klub Sepak Bola Persebaya. *Jurnal Penjakora*, 82-91.
- Gaio, A. M., Mondry, & Diahloka, C. (2015). ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN PADA PEMBERITAAN KONFLIK KPK VS POLRI DI VIVANEWS.CO.ID DAN DETIKNEWS.COM. *JISIP*, 451-455.
- Johanes, L. (2013). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KONFLIK PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) DI HARIAN MEDIA INDONESIA DAN KORAN SINDO. *JURNAL E-KOMUNIKASI*, 83-92.

- Juditha, C. (2014). FRAMING BERITA POLEMIC LURAH LENTENG AGUNG PADA MEDIA ONLINE. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 94-111.
- Khoironi, L., & Fitriawan, R. A. (2018, Juni). Pembungkai Pemberitaan Nonton Bareng Film G30S/PKI di Media Daring (Analisis Framing Pan & Kosicki pada Media Detik.com dan Kompas.com). *ULTIMACOMM*, 72-91.
- Musniyah Ayunita Muzakkir, R. A. (2020, Juni). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PEMBANGUNAN POJOK DILAN PADA MEDIA PIKIRAN-RAKYAT.COM DAN NEWS.DETIK.COM/JAWABARAT. *Common*, 65-77.
- Santoso, D. H., & Lestari, R. D. (2018, Oktober). Penerapan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Politik di Media Online (Studi Kasus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta). *Jurnal Pekomm*, 203-212.
- Setiansah, M. (2009). Politik Media dalam Membungkai Perempuan (Analisis Framing Pemberitaan Kasus Video Porno Yahya Zaini dan Maria Eva di Harian Umum Kompas dan Suara Merdeka). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 137-154.
- Wiranata, R. (2014). ANALISIS BERITA TENTANG ABURIZAL BAKRIE SEBAGAI KANDIDAT PRESIDEN DI OKEZONE.COM DAN VIVA.CO.ID. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 170-183.

Internet:

- Permana, R. H. (2020, September 27). *detikNews*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-5190210/bukan-pertama-kali-vanuatu-rutin-serang-indonesia-soal-papua-di-pbb/2>
- Permana, R. H. (2020, September 27). *detikNews*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-5190065/sidang-umum-pbb-indonesia-minta-vanuatu-tak-ikut-campur-soal-papua/2>
- Mukaromah, V. F. (2020, September 28). *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/28/133200465/diingatkan-jangan-ikut-campur-sudah-beberapa-kali-vanuatu-singgung-isu?page=all>

